

KEPALA DAERAH DAN KONSERVASI LINGKUNGAN LAHAN BASAH: STUDI KEBIJAKAN LINGKUNGAN KOTA BANJARMASIN PINTAR

Local Leader and Wetland Conservation: Study of Environment Policy in Smart Banjarmasin City

Noviana Sari *, Andika Sanjaya

Department of Communication Sciences, FISIP ULM, Hasan Basry Kayutangi, South Kalimantan, Indonesia

*Penulis koresponden: noviana_sari@ulm.ac.id.

Abstract

Banjarmasin is included in the top 50 cities in Indonesia that are included too in the second phase of the smart city pilot project. Ibnu Sina, as a Banjarmasin Mayor is a head of the region also made the smart city as a slogan in managing his administration. The smart city has several characteristics consisting of a smart economy, smart society, smart governance, smart mobility, smart life, and smart environment. From all of them, the characteristics of the smart environment are one of the main challenges of Banjarmasin City. The smart environment consists of the attractiveness of natural conditions, pollution, sustainable resource management, and environmental protection. Indicators of environmental protection cannot be separated from environmental conservation. Therefore, the opinion of the regional head on environmental protection and conservation is interesting to study. The smart city program is a program that is attached to the regional head. Floods, droughts, land and forest fires and also haze are some of the disasters faced by Banjarmasin City. One of the causes of this disaster is due to the development of economically oriented wetlands. In fact, wetlands are environmental conditions that require special attention. This research is a qualitative descriptive study with interview methods and secondary source studies. Researchers want to explore how to understand smart environmental indicators in Banjarmasin City. The research informant is Ibnu Sina as the Mayor of Banjarmasin City. Smart cities can be an urban solution to urban problems, but can also be just labels, campaign material, and hoax. Despite offering solutions, smart cities store latent problems. Without a clear understanding of smart cities, regional heads can take advantage of smart city programs just to reach potential votes ahead of local leader elections. Therefore, research traces the extent to which regional heads understand smart cities and specifically smart environments. Is it really an urban solution or just a regional head of political communication?

Keywords: Political communication, smart city, smart environment, wetlands, environmental conservation.

1. PENDAHULUAN

Konsep *smart city* atau 'kota pintar' telah digagas dan mulai diterapkan di kota-kota negara maju sejak awal milenium baru yang lalu dimana kemajuan teknologi menjadi fondasinya. Konsep ini mulai terdengar di Indonesia sejak beberapa tahun terakhir dan dalam pelaksanaannya, aktor yang dominan berperan adalah aparatur pemerintah setempat. Masalah klasik akan keterbatasan jumlah dan skill aparatur pun selalu muncul. Belum lagi menyangkut anggaran pembangunan yang acap rumit. Kota pintar merupakan sebuah konsep kota pintar atau kota pintar yang bisa membantu masyarakat setempat bagaimana cara mengelola sumber daya yang ada secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kualitas hidup orang-orang yang tinggal di kota. Kota pintar memiliki sasaran bagaimana mengatasi berbagai persoalan perkotaan agar tercipta kehidupan berkualitas.

Konsep kota pintar ini dinamis dan mengalami perubahan sesuai dengan tuntutan zaman. Oleh karena itu tidak ada definisi yang kaku, melainkan pendekatan-pendekatan melalui aspek-aspek kunci yang bersifat informatif yaitu: infrastruktur digital yang modern; pemahaman bahwa pelayanan akan lebih baik jika terpusat pada masyarakat; infrastruktur fisik yang pintar; keterbukaan akan pendekatan dan model yang baru; dan transparansi akan capaian (Department for Business, Innovation and Skills the United Kingdom 2013).

Konsep ini juga mempunyai beberapa elemen sebagai ciri khas dalam kota pintar yaitu *smart economy* (ekonomi pintar) yang meliputi faktor seperti inovasi, kewirausahaan, *self-branding* (citra diri), produktivitas, dan juga persaingan dalam pasar internasional. Kemudian ada juga *smart people* (masyarakat pintar) yang tidak hanya terkait dengan *level* pendidikan dari masyarakat itu sendiri, tetapi juga bagaimana interaksi sosial yang terjadi didalamnya. *smart governance* (pengelolaan pintar)

meliputi faktor-faktor seperti partisipasi politik, kualitas pelayanan dan administrasi publik. Aksesibilitas lokal maupun internasional merupakan faktor-faktor dari *smart mobility* (mobilitas pintar) selain dari ketersediaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), serta sistem transportasi perkotaan yang ramah lingkungan. *Smart environment* (lingkungan pintar) yang berkaitan dengan isu-isu perlindungan lingkungan alami dan *smart living* (pola hidup pintar) yang berkaitan dengan aspek kualitas hidup masyarakat kota juga merupakan dua elemen yang tidak kalah penting. Elemen-elemen ini tidak harus semuanya dikembangkan namun dapat difokuskan pada satu atau sebagian saja tergantung dengan potensi dan karakter kota tersebut (Giffinger *et al.* 2007).

Kota Banjarmasin masuk dalam 50 besar kota di Indonesia yang masuk dalam proyek percontohan kota pintar fase kedua. Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina selaku kepala daerah juga menjadikan kota pintar sebagai slogannya dalam pengelolaan pemerintahannya. Kota pintar memiliki beberapa karakteristik yang terdiri dari ekonomi pintar, masyarakat pintar, pemerintahan pintar, mobilitas pintar, kehidupan pintar, dan lingkungan pintar. Dari kesemuanya, karakteristik lingkungan pintar adalah salah satu tantangan utama Kota Banjarmasin.

Meskipun menawarkan solusi, kota pintar menyimpan permasalahan yang laten. Tanpa pemahaman kota pintar yang jelas, kepala daerah dapat memanfaatkan program kota pintar hanya sekedar untuk meraih potensi suara menjelang pemilihan kepala daerah. Asumsi tersebut diutarakan oleh Menteri Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Rudiantara. Menteri yang memegang peranan penting dalam "*Gerakan Menuju 100 Smart City*" (Kemkominfo 2017a). Kota pintar juga dapat dijadikan sebagai tren, proyek sesaat (Kemkominfo 2018), label, pencitraan, hoaks, atau konten pemasaran (Yigitcanlar dan Lee 2013). Program kota pintar adalah program yang melekat dengan kepala daerah. Gambar atau grafik kepala daerah sering terpampang dalam media program-program kota pintar, situs misalnya (Sanjaya 2018).

Lingkungan pintar terdiri dari faktor daya tarik kondisi alam, polusi, manajemen sumber daya berkelanjutan, dan perlindungan lingkungan. Indikator perlindungan lingkungan tidak dapat dipisahkan dengan konservasi lingkungan (Giffinger *et al.* 2007). Bencana banjir, kekeringan, kebakaran lahan dan hutan serta kabut asap adalah beberapa bencana yang dihadapi Kota Banjarmasin. Salah satu penyebab bencana ini dikarenakan pembangunan di lahan basah yang berorientasi ekonomi. Padahal, lahan basah merupakan kondisi

lingkungan yang membutuhkan perhatian khusus (Walhi Kalsel 2013).

Berada di kawasan lahan basah dataran sungai, kehidupan masyarakat Banjarmasin tidak dapat dipisahkan dari kehidupan air. Secara turun temurun, mereka memiliki kedekatan secara emosional terhadap sungai (Muchamad, Mentayani, dan Aufa 2010). Oleh karena itu, penelitian ini menelusuri sejauh mana kepala daerah memahami kota pintar dan secara khusus lingkungan pintar. Apakah memang menjadi solusi perkotaan atau sekedar komunikasi politik kepala daerah?

2. METODE

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Moelong (2007:5) adalah upaya untuk menyajikan dunia sosial dan perspektifnya di dalam dunia dari segi konsep, perilaku persepsi dan persoalan tentang manusia yang diteliti.

Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif yang menggambarkan atau menerangkan serta menginterpretasi secara terperinci mendekati keadaan sebenarnya mengenai suatu keadaan yang menjadi objek penelitian yang datanya lebih mengambil bentuk kata-kata dan gambar daripada angka.

Penelitian ini menggunakan metode wawancara. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan tanya jawab sambil bertatap muka antara penanya atau pewawancara dengan penjawab atau informan dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara) (Nazir, 1999).

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dilakukan secara sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini ada 3 (tiga) orang, yaitu dengan mewawancarai Ibnu Sina selaku Walikota Banjarmasin sebagai Informan pertama. Informan kedua yaitu Kepala Bidang Layanan *E-Government* Diskominfo Kota Banjarmasin, Ahmad Syarwani. Dua informan pertama dipilih karena menjadi informan kunci dalam pengembangan kota pintar di Kota Banjarmasin.

Informan ketiga adalah Kepala Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Arif Budiman. Informan ketiga bukan berasal dari lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin, melainkan dari Kota Semarang. Pemilihan informan ketiga ini didasari posisi Kota Semarang yang sudah masuk daftar 25

besar awal kota pintar di Indonesia sebelum daftar 50 besar pada sesi kedua dimana Banjarmasin termasuk. Nilai Kota Semarang paling tinggi dalam asesmen sesi pertama yang menghasilkan asesmen 25 kota pintar pada tanggal 22-23 Mei 2017 di Makassar (Kemkominfo 2017b). Nilai Kota Semarang juga berada di atas rata-rata dalam evaluasi nasional kota pintar yang digelar tanggal 25-26 Juli 2018 di Semarang. Evaluasi mempertimbangkan posisi kota sebelum masuk "Gerakan Menuju 100 *Smart City*", setelah terbentuk pondasi, setelah pelaksanaan rencana dari buku induk, dan manfaat yang dirasakan masyarakat.

Informan kedua mengkonfirmasi bahwa pihaknya pernah melakukan studi banding ke Pemko Semarang. Informan kedua menyebutkan Pemkot Semarang adalah salah satu pemerintah daerah yang terbuka untuk kerja sama dan dimintai konsultasi. Informan ketiga dapat menjawab implementasi kota pintar secara mendalam karena sudah melewati fase-fase yang baru akan dilalui Pemko Banjarmasin.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kota Banjarmasin Pintar

Kota Banjarmasin masuk dalam daftar 50 kota pintar di Indonesia tahap kedua melalui asesmen pemerintah pusat pada tanggal 6 Maret 2018. Pemko Banjarmasin mengikuti asesmen bersama dua pemerintah daerah lain di Kalimantan Selatan, yaitu Kota Banjarbaru dan Kabupaten Banjar. Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru berhasil lolos, sedangkan Kabupaten Banjar gagal.

Setelah dinyatakan layak, Pemko Banjarmasin menandatangani nota kesepakatan untuk mengikuti empat kali bimbingan teknis (bimtek) dan satu kali sosialisasi atau *focus group discussion* (FGD). Bimtek kota pintar Banjarmasin diikuti oleh dewan kota pintar, tim teknis kota pintar, dan kepala sub bagian perencanaan, dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.

Bimtek pertama dilaksanakan pada tanggal 2-3 Juli 2018 dengan menghasilkan buku pertama rencana induk kota pintar. Bimtek pertama menjadi prasyarat dilaksanakannya bimtek kedua, dan seterusnya. Bimtek kedua dilaksanakan pada tanggal 16-17 Agustus 2018 menghasilkan buku rencana induk kota pintar kedua. Bimtek ketiga dan keempat diselenggarakan pada tanggal 17-18 September 2018 dan 29-30 Oktober 2018.

Bimtek keempat, selain menghasilkan buku keempat, juga menghasilkan penandatanganan komitmen bersama lintas unsur-unsur pemerintah daerah. Bimtek keempat menjadi prasyarat dari

diselenggarakannya FGD. Tim kota pintar mempresentasikan *quick-win* dan rencana induk kota pintar di Jakarta. Penglibatan *quick-win* ini menunjukkan sisi eksklusif dari kota pintar Banjarmasin. Arah kota pintar Banjarmasin tertuang dalam visi dan misi yang khusus.

Pemko Banjarmasin memiliki misi menjalankan pemerintahan yang efektif dan efisien. TIK menjadi alat untuk mewujudkan misi tersebut. Namun, pemerintahan pintar dengan TIK hanyalah konsep dasar kota pintar yang umum dipakai di setiap daerah. Pemko Banjarmasin memiliki konsep kota pintar yang berbeda.

Pemko Banjarmasin merumuskan rancangan kota pintar yang mempertimbangkan kondisi alam yang dialiri banyak sungai. Informasi pemfokusan lingkungan sungai diperoleh dari wawancara berikut:

"Visi dari smart city Kota Banjarmasin mewujudkan kota sungai sebagai smart city yang mengedepankan pelestarian kearifan lokal" (Informan 2).

Pemko Banjarmasin mengembangkan sungai sebagai pusat perekonomian kota. Hal ini sejalan dengan sejarah Kota Banjarmasin yang sarat dengan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang bertumpu pada sungai. Informan 1 yang menjabat kepala daerah juga menguatkan argumen tersebut:

"Ada ciri khas otentik Banjarmasin yang tidak dapat ditiru daerah lain. Potensi sungai kita cukup bagus dan sangat indah. Potensi sungai sudah kita masukkan sejak di buku 1" (Informan 1).

Pemko Banjarmasin memiliki diferensiasi memiliki lanskap sungai, namun, pemosisian tersebut memerlukan konsistensi. Informan 1 menguatkan argumen tersebut:

"Kita harus berbeda, punya keunggulan. Kita punya sungai. Posisi kita menguntungkan, jika konsisten, disitu makin jelas kita" (Informan 1).

Selain mengangkat budaya dan kearifan lokal, Pemko Banjarmasin juga memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan. Informasi ini diperoleh melalui wawancara informan 2:

"Misi kita mewujudkan Banjarmasin yang nyaman dan berkelanjutan" (Informan 2).

Kata "berkelanjutan" atau "*sustainable*" dalam pemaparan informan 2 ini sejalan dengan salah satu

faktor lingkungan pintar yang diperkenalkan (Giffinger, 2007). Keberlanjutan ini mengacu pada sumber daya-sumber daya lingkungan.

3.2 Lingkungan Kota Banjarmasin Pintar

Pemko Banjarmasin sudah menyusun rangkaian program yang akan dijalankan sejak tahun 2019 hingga 2028. Melalui wawancara dengan informan 2 pada tanggal 29 Oktober 2018, diperoleh informasi bahwa sudah terdapat 36 program kota pintar Banjarmasin. Mayoritas program kota pintar Kota Banjarmasin dijalankan pada tahun 2019, namun, ada beberapa program yang sudah dijalankan sejak tahun 2018. Penandatanganan komitmen seluruh elemen Pemko Banjarmasin baru dijalankan pada tanggal 29 Oktober 2018.

Program kota pintar yang diprioritaskan di awal berkaitan dengan kesehatan dan lingkungan. Program awal ini dijalankan pada tahun 2018. Program pertama adalah aplikasi *e-puskesmas* yang berkaitan dengan kesehatan. Program kedua adalah aplikasi bank sampah digital yang berkaitan dengan lingkungan. Selain kedua program, pengembangan rencana induk kota pintar secara keseluruhan juga dilakukan hingga di penghujung tahun 2018. Pengembangan kota pintar melalui bimtek dan sosialisasi atau FGD dengan pemerintah pusat.

Salah satu program awal kota pintar Banjarmasin yang menjadi prioritas awal adalah aplikasi bank sampah digital. Aplikasi bank sampah digital merupakan program yang sangat berkaitan dengan konservasi lingkungan.

3.3 Kepala Daerah dan Konservasi Lingkungan

Kepala daerah memiliki peranan penting dalam implementasi kota pintar. Hal tersebut merupakan hasil temuan dari Yuliarti, Nurhaeni, dan Nugroho (2016), Sanjaya, Alunaza, Hidayah, dan Biyoga (2017). Kepala daerah memiliki kaitan erat dengan pemberitaan media untuk kasus kota pintar. Kepala daerah adalah pihak yang hampir selalu dicari oleh para jurnalis.

Lebih lanjut, Rusli, Sanjaya, dan Muthahari (2018) menggarisbawahi peran kota pintar sebagai alat komunikasi politik kepala daerah. Pemberitaan kota pintar bernada positif cenderung dapat digunakan sebagai sarana kampanye. Penyebutan frase kepala daerah yang terlampau tinggi mencerminkan potensi untuk digunakan sebagai strategi pemenangan pemilihan umum oleh kepala daerah.

Peranan kepala daerah dalam implementasi kota pintar tersebut berlaku untuk konteks Kota Banjarmasin. Informasi tersebut diperoleh melalui wawancara berikut ini:

"Bapak Walikota kemarin sangat antusias biar bisa masuk daftar 50 kota pintar ini" (Informan 2).

Kepala daerah berkeinginan untuk meloloskan daerah yang mereka pimpin selain untuk pencapaian pemerintahan, juga karena ada pembiayaan dari pemerintah pusat. Kota atau kabupaten yang berhasil lolos asesmen, maka pengembangan program kota pintar dibiayai pemerintah, termasuk disediakan ahli-ahli yang dapat mendampingi selama proses.

"...jatah yang pertama 25 tahun 2017, 2018 ada 50 dan 25 2019, itu yang dibiayai sama kemkominfo" (Informan 3).

Jika kepala daerah gagal meloloskan daerahnya, maka mereka harus mendanai sendiri untuk pengembangan program kota pintar. Hal ini dijelaskan oleh informan 3:

"Yang dibiayai Kemkominfo ada 100 dengan acara di asesmen dulu dan yang masuk grade baru dipanggil. Selain itu kabupaten kota mendanai sendiri" (Informan 3).

Konsekuensi dari keikutsertaan Kota Banjarmasin dalam kota pintar adalah kepala daerah harus meningkatkan kolaborasi antara pemerintah dan lintas pemangku kepentingan. Bimtek pertama pada tanggal Juli 2018 dan rancangan buku induk harus selesai pada Desember 2018. Pemerintah daerah harus menyelesaikan rancangan induk selama hanya sekitar 6 bulan. Rancangan induk tersebut kemudian akan dievaluasi secara berkala. Hal tersebut diutarakan dalam wawancara:

"Ketika kita masuk daftar kota pintar, kita harus lebih bekerja keras" (Informan 2).

Kepala daerah berfungsi sebagai penggerak dalam program Kota Pintar Banjarmasin. Jika selama ini Kota Banjarmasin dikenal sebagai "Kota Seribu Sungai" atau "*Banjarmasin Smart City*", kepala daerah mencetuskan konsep slogan tambahan, yaitu "*dRiver*". Hal tersebut tertuang dalam wawancara informan berikut:

"Kalau dulu Banjarmasin dikenal sebagai Kota Seribu Sungai dan ada juga Banjarmasin Smart City, sekarang ada sedikit tambahan, dRiver atau dibaca "driver", atau sopir. Artinya bergerak, "mobile", paling kuat dari internal, "drive the internal force". Jadi harus ada kekuatan yang menggerakkan (Informan 1).

Kepala daerah merupakan pemangku kepentingan terkuat yang menggerakkan implementasi kota pintar dari dalam. Slogan "dRiver" menggambarkan bagaimana kepala daerah memegang peranan penting dalam pencapaian kota pintar. Hal tersebut sejalan dengan wawancara informan 2 yang menyebutkan bahwa kepala daerah yang berinisiatif tinggi bisa berkontribusi meloloskan Kota Banjarmasin ke daftar 100 kota pintar nasional.

Kepala daerah memproyeksikan Kota Banjarmasin menjadi gerbang ekonomi Kalimantan pada tahun 2025. Informan 1 selaku kepala daerah memfokuskan pada tiga hal yang kurang lebih berkaitan dengan visi dan misi. Fokus pertama adalah transportasi dan pariwisata, yang mana sungai juga masuk dalam aspek ini. Fokus kedua adalah menghidupkan aspek perdagangan, menumbuhkan wirausaha-wirausaha baru. Fokus ketiga adalah pelayanan publik yang berbasis pada ekonomi kreatif dan kota pintar. Dari sini terlihat bahwa kepala daerah mengutamakan ekonomi dan berbasis kehidupan sungai. Padahal, seperti ditekankan Walhi Kalsel (2013), pembangunan berorientasi ekonomi dapat berbahaya jika tanpa mengindahkan lingkungan lahan basah Banjarmasin yang rentan.

3.4 Kepala Daerah dan Penanganan Sampah

Aspek lingkungan tidak secara langsung disebutkan dalam tiga fokus utama Pemko Banjarmasin. Namun, aspek lingkungan dijadikan sebagai penopang. Tanpa konservasi lingkungan, ketiganya tidak akan optimal. Hal tersebut seperti yang diutarakan informan 1:

"Dulu kita sembunyikan, sampah ada di mana-mana, di sungai. Justru dari kelemahan itu kita jadikan keunggulan. Sungai-sungai jadi gara depan, kita harus berani" (Informan 1).

Informan 1 menjelaskan bahwa sampah adalah permasalahan lingkungan yang ingin diatasi pemerintah kota. Masyarakat banyak membuang sampah sembarangan dan sebagian membuangnya di sungai. Sampah yang dibuang di sungai akan

mengancam keberlanjutan lingkungan. Sungai sebagai garda depan, artinya selama ini kepala daerah sadar kalau sungai dipenuhi sampah, ia ingin menanganinya.

Salah satu program kota pintar yang digagas oleh kepala daerah adalah digitalisasi bank sampah. Bank sampah Banjarmasin memenangi penghargaan salah satu bank sampah terbaik se-Indonesia dalam Hari Peduli Sampah Nasional 2017. Masyarakat Banjarmasin menghasilkan sampah hingga 600-ton setiap harinya. Program bank sampah ini dicanangkan untuk menangani sampah kota (Antaranews 2017).

Namun, bank sampah ini juga memiliki permasalahan yang harus dicarikan solusinya. Informasi diperoleh melalui informan 2:

"Kita ingin bank sampah digital, selama ini secara manual. Bank sampah itu dalam bentuk tabungan dapat digunakan untuk bayar listrik, isi pulsa, bayar PDAM (air), dan keperluan lain. Setelah mereka menyetor sampah, mereka tidak tahu berapa mereka sudah menyetor" (Informan 2).

Kota pintar dapat digunakan untuk mencari solusi permasalahan bank sampah. Informasi tersebut diperoleh melalui informan 2:

"Setelah disetor ke unit, dimasukkan oleh unit, masuk ke aplikasi, ditimbang berapa sampahnya, itu terpantau semua. Masyarakat penyetor bisa memantau tabungan dia, dapat melihat secara online. Ini untuk masalah sampah. Daripada membuang sampah di sungai, bank sampah digital itu membantu mereka (masyarakat) juga." (Informan 2).

Kepala daerah memanfaatkan aspek teknologi dalam program kota pintar untuk mendigitalisasi bank sampah yang sudah berjalan. Gagasan kota pintar berasal dari kepala daerah, informasi tersebut diperoleh melalui informan 2:

"Ide (bank sampah digital) itu dari Pak Wali, yang diakomodir oleh kita (pemerintah kota)." (Informan 2).

Meskipun gagasan konservasi lingkungan tersebut sudah ada, namun program bank sampah digital tersebut belum dijalankan. Program tersebut masih dirumuskan proses bisnisnya, dirancang oleh pembuat program (*programmer*). Menurut rencana, aplikasi bank sampah digital dapat diakses pada

tahun 2019. Masyarakat dapat mengetahui dimana bank sampah terdekat dari tempat tinggal.

Selain bank sampah digital, program lingkungan unggulan Pemko Banjarmasin lainnya adalah program “pemangku sungai”. Informasi tersebut diperoleh melalui wawancara berikut:

“Kalau sawah ada kepala ladang, setiap sungai nantinya ada pemangku sungai. Bertanggung jawab, mereka memberitahu ke dinas terkait misalkan ada sampah di sungai. Tidak ada sampah. Komunikasi dengan aplikasi, pemangku sungai dan pemerintah. Kalau itu ide kepala dinas” (Informan 2)

Program kota pintar bank sampah digital dan pemangku sungai sama-sama menggunakan TIK. Namun, keduanya juga memerlukan aspek sumber daya manusia. Kepala daerah sebagai penggerak seringkali memiliki ide tentang kota pintar, namun, ide juga dapat datang darimanapun. Sebagai contoh, program pemangku sungai berasal dari salah satu kepala dinas.

Oleh karena itu, kepala daerah dan pemerintah kota perlu melibatkan pemangku kepentingan lain, terutama masyarakat, untuk memperoleh ide terhadap solusi perkotaan. Selain itu, masyarakat juga pada akhirnya pengguna dari layanan kota pintar. Kepala daerah mengakses langsung kepada masyarakat untuk sosialisasi program menggunakan media sosial, seperti yang tertera pada gambar 1. Kepala daerah menjelaskan kepada masyarakat pengguna media sosial tentang program pemerintah kota.



Sumber: Instagram Ibnu Sina (2018)

Gambar 1. Sosialisasi program kota pintar oleh kepala daerah kepada masyarakat.

Kepala daerah juga mengakses komunitas-komunitas di masyarakat secara tidak langsung.

Pemerintah kota mengumpulkan komunitas-komunitas di Kota Banjarmasin untuk turut serta dalam pembangunan kota pintar. Informasi tersebut diperoleh melalui wawancara berikut:

“Di menara pandang itu akan dibangun tempat komunitas, silahkan datang ke sana, ide-ide solusi kota silahkan dituangkan disana. Kita memberikan fasilitas-fasilitas untuk komunitas berkarya. Pemuda-pemuda yang tergabung dalam C-GEN kita libatkan. Setiap kali masuk, nanti mendaftar harus isi buku tamu” (Informan 2).

Kepala daerah dapat memanfaatkan komunitas-komunitas di Kota Banjarmasin untuk memperoleh ide-ide yang tepat guna untuk masyarakat. Salah satu komunitas andalan yang dilibatkan adalah komunitas C-GEN (Cipta Generasi Indonesia). Komunitas C-GEN adalah komunitas pemuda yang dibina oleh Prof. Suhono Harso Supangkat. Visi dari C-GEN adalah membentuk remaja yang berkarakter, pintar, dan kreatif melalui pemanfaatan TIK. Komunitas ini memasukkan nilai-nilai yang diinternalisasi kepada para anggotanya, antara lain keterhubungan (*konektivitas*), kolaborasi (*collaborative*), kreativitas (*creativity*), dan karakter yang positif (*character*). Keempat nilai tersebut penting untuk implementasi kota pintar (Cipta Generasi Indonesia, 2018).

Pendiri C-GEN Prof. Suhono Harso Supangkat adalah salah satu penggagas kota pintar di Indonesia. Suhono beranggapan bahwa secara prinsip, pekerjaan walikota adalah memahami persoalan masyarakat. Kepala daerah ada yang memilih melakukan “blusukan” atau terjun langsung ke masyarakat. Proses pertama adalah *sensing* (mengetahui), *understanding* (memahami), dan *action* (bertindak). Kota pintar menurutnya adalah penyajian informasi komprehensif yang dapat diakses melalui ruang kontrol. Kepala daerah dapat mengambil kebijakan berdasar data langsung, bukan dari “pembisik”. Meskipun pada awalnya kota pintar hanya tentang teknologi, pada perkembangannya, kota pintar juga melibatkan komunitas inovator. Jika permasalahannya tentang sampah atau lingkungan, maka komunitas ini dapat diajak untuk mencari solusi urban (Putri, 2014).

Kepala daerah Kota Banjarmasin sudah mulai mepedulikan permasalahan sampah dengan program kota pintar. Namun, program tersebut masih belum cukup, apalagi jika mengacu pada faktor-faktor lingkungan pintar yang diperkenalkan oleh Giffinger dan kolega (2007). Faktor daya tarik kondisi alam, manajemen sumber daya

berkelanjutan, dan perlindungan lingkungan ditangani dengan aplikasi bank sampah digital dan pemangku sungai. Hal ini masih terbatas, karena permasalahan Kota Banjarmasin tidak hanya sampah. Permasalahan polusi udara dan bahaya efek rumah kaca juga belum disentuh. Pemko Banjarmasin perlu mempersiapkan warganya terhadap penyakit pernafasan. Masyarakat juga perlu dilibatkan untuk konservasi lingkungan dan menyadari pentingnya melindungi alam. Penggunaan air dan listrik juga perlu ditekan, hal ini perlu diedukasi. Gagasan pemangku sungai dan komunitas C-Gen adalah salah satu cara untuk melibatkan masyarakat untuk sementara ini.

4. SIMPULAN

Melalui pembahasan penelitian ini, dapat diperoleh beberapa temuan. Kota Banjarmasin memiliki sisi keotentikan yang terletak pada sungai. Potensi sungai sudah dimasukkan dalam program kota pintar sejak dini. Program kota pintar Pemko Banjarmasin sudah mempertimbangkan aspek lingkungan yang berkelanjutan. Namun, fokus utama isu lingkungan terkait sampah di sungai. Sungai menjadi pusat kehidupan Kota Banjarmasin sejak turun temurun lintas generasi.

Kepala daerah memiliki peranan penting dalam implementasi kota pintar, secara khusus program-program yang menasar ke konservasi lingkungan. Kepala daerah adalah inisiator awal dari Kota Pintar Banjarmasin agar masuk daftar nasional. Hal ini selain bermanfaat untuk pencapaian pemerintahan juga dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat.

Setelah lolos asesmen sebagai kota pintar, kepala daerah selanjutnya berperan dalam mempengaruhi elemen-elemen pemerintah kota. Kelancaran program kota pintar sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan kepala daerah. Meskipun demikian, arah kota pintar kepala daerah yang terlalu memfokuskan pada perekonomian perlu dikritisi. Pembangunan yang hanya berorientasi pada ekonomi dapat menimbulkan permasalahan bagi lingkungan.

Kepala daerah Kota Banjarmasin menasar pada permasalahan sampah. Digitalisasi bank sampah dan pemangku sungai adalah program-program lingkungan yang termasuk dalam prioritas kota pintar. Ide solusi permasalahan kota dapat berasal dari kepala daerah, maupun pihak-pihak lain. Oleh karena itu, kepala daerah perlu mengakses ide-ide dari internal maupun eksternal pemerintah kota.

Kepala daerah melakukan sosialisasi program kepada masyarakat dan mengakses ide solusi urban dengan media sosial. Selain itu, kepala daerah juga memanfaatkan komunitas inovator yang didukung fasilitas-fasilitas pendukung. Kota pintar adalah bagaimana kepala daerah dapat memanfaatkan informasi yang komprehensif untuk mengetahui apa yang terjadi di masyarakat. Ruang kontrol berbasis TIK ini memudahkan kepala daerah untuk mengambil keputusan.

Meskipun sudah cukup menasar permasalahan sampah di sungai, namun ada beberapa faktor lingkungan pintar yang belum diperhatikan. Permasalahan polusi udara, efek rumah kaca, kesehatan pernafasan, dan edukasi masyarakat belum diperhatikan oleh kepala daerah.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Alawadhi S, Aldama-Nalda A, Chourabi H, Gil-Garcia JR, Leung S, Mellouli S, *et al.* 2012. Building understanding of smart city initiatives. *11th IFIP WG 8.5 International Conference on Electronic Government*, 7443, 40-53. doi:10.1007/978-3-642-33489-4_4
- Albino V, Berardi U, Dangelico RM. 2015. Smart Cities: Definitions, dimensions, performance, and initiatives. *Journal of Urban Technology* 22(1): 3–21. doi:0.1080/10630732.2014.942092
- Antara News. 2017. Bank Sampah Banjarmasin masuk enam terbaik se-Indonesia [Portal Berita Online]. Diakses: 11 February 2018. <https://www.antaranews.com/berita/617812/bank-sampah-banjarmasin-masuk-enam-terbaik-se-indonesia>
- Cipta Generasi Indonesia. 2018. C-GEN: About Us [Situs Resmi Yayasan]. Diakses: 11 February 2018. <http://www.cgenindonesia.id/home/AboutUs>
- Giffinger R, Fertner C, Kramar H, Kalasek R, Pichler-Milanovic N, Meijers E. 2007. *Smart Cities—Ranking of European Medium-sized Cities (Report)*. Vienna University of Technology. http://www.smart-cities.eu/download/smart_cities_final_report.pdf
- Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. 2017a. *Menkominfo Imbau Kepala Daerah Tak Jadikan 'Smart City' Bahan Jualan*. Situs Resmi Kementerian Komunikasi Dan Informatika RI (blog), November 16, 2017. https://www.kominfo.go.id/content/detail/11494/menkominfo-imbau-kepala-daerah-tak-jadikan-smart-city-bahan-jualan/0/sorotan_media
- Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. 2017b. *Gerakan Menuju 100 Smart City Diawali dari Makassar*. Situs Resmi Kementerian. https://kominfo.go.id/content/detail/9760/gerakan-menuju-100-smart-city-diawali-dari-makassar/0/sorotan_media
- Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. 2018. *Kemenkominfo: Penerapan Smart City Jangan*

- Hanya Jadi Tren dan Proyek Sesaat*. Situs Resmi Kementerian.
https://www.kominfo.go.id/content/detail/13601/kemenkominfo-penerapan-smart-city-jangan-hanya-jadi-tren-dan-proyek-sesaat/0/sorotan_media
- Moleong, Lexy J. (2007) *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Penerbit PT Remaja Rosdakarya Offset, Bandung
- Muchamad BN, Mentayani I, Aufa N. 2010. The Concept of Floating Construction as a Model for Sustainable Development in Wetland Area. *The 11th International Conference on Sustainable Environmental Architecture (SENVAR)*, October 14th 2010. Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin.
- Nazir M. 1999, *Metode Penelitian, Cetakan Ketiga*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Putri ML. 2014. Prof. Dr. Ir. Suhono H. Supangkat: Pencetus Ide Smart City Pendukung Pembangunan Berkelanjutan. Situs Universitas. <https://www.itb.ac.id/news/read/4535/home/prof-dr-ir-suhono-h-supangkat-pencetus-ide-smart-city-pendukung-pembangunan-berkelanjutan>
- Rusli A, Sanjaya A, Muthahari M. (Eds.). 2018. *Dinamika Komunikasi dan Kearifan Lokal*. Prodi Ilmu Komunikasi ULM, Banjarmasin.
- Sanjaya A, Sadiwara HA, Hidayah T, Biyoga S. 2017. Mass Media and Green Airport in Indonesia: Do They Aware of Smart Village (pp. 543–552). Presented at *The 9th International Graduate Students and Scholars Conference in Indonesia*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalsel. 2013. Ancaman Bencana Ekologis di Kalsel. Situs Lembaga. <http://walhikalsel.or.id/?p=114>.
- Yigitcanlar T, Lee SH. 2013. Korean ubiquitous-eco-city: a smart-sustainable urban form or a branding hoax? *Technological Forecasting and Social Change* 89: 100-114
- Yuliarti MS, Nurhaeni IDA, Nugroho RA. 2016. Smart city and media (When Kompas online talks about smart cities in Indonesia). In *International Conference on Public Management (ICPM) 2016* (pp. 406-408).
-